

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jepang merupakan negara kepulauan yang berada di Asia Timur. Negara yang dikenal dengan sebutan “negara matahari terbit” ini terkenal dengan bidang industri yang berkembang pesat, keindahan bunga sakura yang mampu menarik wisatawan sampai dengan *anime* yang mendunia. Kata “Jepang” merupakan kata eksonim. *Eksonim* adalah penyebutan nama suatu tempat yang tidak digunakan oleh penduduk lokal tempat tersebut. Masyarakat Jepang sendiri menyebut negaranya sebagai 日本 (*nihon*). 日 (*ni*) adalah huruf kanji yang berarti matahari dan 本 (*hon*) merupakan kanji yang berarti sumber atau asal. Dari sinilah sebutan “negara matahari terbit” berasal.

Pendapat lain mengenai asal penyebutan “negara matahari terbit” ini adalah menurut Susy Ong (2018, 3), pada abad ke-7 Pangeran Shotoku mengirim surat kepada kaisar Tiongkok. Dalam surat yang ditujukan kepada Kaisar Tiongkok, tercantum kata-kata “dari penguasa di negara matahari terbit kepada penguasa di negara matahari terbenam”; maksudnya adalah mengatakan letak posisi Jepang yang berada di sebelah timur Tiongkok (=arah matahari terbit).

Bentuk negara Jepang adalah monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang kaisar, tetapi yang menjalankan roda pemerintahan adalah seorang perdana menteri. Negara yang ber ibu kota di Tokyo ini memiliki luas wilayah sekitar 377.972 km², terdiri dari 4 pulau utama yaitu Hokkaido, Honshu, Shikoku dan Kyushu. Selain itu, Jepang juga terdiri dari 3000 pulau berukuran kecil termasuk Okinawa dan pulau kecil lain yang berpenghuni ataupun tidak berpenghuni. Secara astronomis Jepang terletak antara 30° LU-47° LU dan antara 128° BT-146° BT. Negara ini memiliki 4 musim, yaitu panas, semi, gugur dan salju. Namun, setiap wilayah di Jepang memiliki rentang waktu yang berbeda untuk tiap musimnya.

Secara geografis, sebelah barat Jepang berbatasan dengan laut Jepang dan selat Korea, sebelah timur berbatasan dengan samudera pasifik, sebelah utara berbatasan dengan laut Okhstock, lalu sebelah selatan berbatasan dengan laut Filiphina dan Laut China Timur.

Karakteristik alam negara Jepang dan Indonesia memiliki banyak kemiripan, yaitu terdiri dari pegunungan, dataran tinggi dan kepulauan. Selain itu, Jepang dan Indonesia sama-sama berada di garis Monsoon Asia. Kedua negara juga merupakan negara kepulauan yang menjadi tempat pertemuan lempeng besar permukaan bumi. Jepang dibelah oleh lempeng Eurasia di barat, lempeng pasifik di timur dan lempeng Filiphine di selatan, karena letak topografi dari negara Jepang tersebut membuat Jepang mudah untuk dilanda bencana alam gempa bumi.

Kemudian sepanjang pulau-pulau di Jepang sebagian besar juga dipisahkan oleh palung-palung besar dan kecil yang suatu saat bisa runtuh dan menimbulkan gempa. Selain itu, 7% gunung aktif yang ada di dunia berada di Jepang dan dengan kata lain ada 86 gunung berapi aktif yang dimiliki negara Jepang (Kodansha Internasional dalam Marsha, 2012, 2). Letusan gunung berapi ini akan mempengaruhi lempeng bumi negara Jepang dan berpotensi mengakibatkan gempa.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pengertian dari bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor (<https://bnpb.go.id/definisi-bencana> diakses pada tanggal 22 Maret 2019 pukul 17:30).

Jepang adalah salah satu negara yang memiliki daftar panjang mengenai bencana. Negara ini telah dilanda banyak bencana, mulai dari gempa bumi, tanah longsor, angin topan hingga tsunami. Di negara Jepang, gempa bumi terjadi secara periodik dan terus menerus (Sekimov, 2012, 8). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Jepang, dari 1036 gempa bumi yang terjadi di dunia dengan kekuatan di atas 6.0 Skala Richter, 212 kejadian gempa bumi terjadi di Jepang.

Bencana melanda Jepang silih berganti. Negara ini mengalami kerugian materiel dan non-materiel yang besar tiap kali bencana terjadi. Dari sana, pemerintah menyadari bahwa ada banyak hal yang menyebabkan jatuhnya banyak korban dan kerusakan yang terjadi tiap kali gempa datang ataupun bencana lain karena sistem penanggulangan bencana masih kurang baik.

Pemerintah Jepang melakukan perubahan demi sistem penanggulangan bencana yang lebih baik. Perubahan pertama terjadi setelah badai teluk Ise melanda kota Nagoya dan sekitarnya pada September tahun 1959. Kejadian ini menelan korban hilang dan meninggal sebanyak 5.098 jiwa. Badai ini juga meruntuhkan kawasan industri Chukyo yang baru saja bangkit semenjak Perang Dunia ke II. Sejak tahun 1945, jumlah korban akibat bencana alam selalu diatas 1000 jiwa tiap tahunnya, namun korban akibat badai teluk Ise jauh lebih besar. Selain itu, ombak tinggi dan badai angin memporak-porandakan kota Nagoya, kejadian ini menyebabkan seluruh Jepang terhenyak.

Kejadian ini telah menyadarkan bahwa ada kekurangan pada kebijakan penanggulangan bencana yang ada di Jepang. Maka, pada tahun 1961 dibuatlah Undang-Undang mengenai Pedoman Kebijakan Penanggulangan Bencana untuk menata ulang secara keseluruhan penanggulangan bencana yang ada di negara Jepang agar jumlah korban yang jatuh bisa ditekan. Pemerintah berharap perbaikan yang dilakukan bisa berdampak maksimal terhadap keselamatan jiwa penduduk Jepang.

Namun perubahan perbaikan penanggulangan bencana kedua terjadi saat gempa bumi berkekuatan 7,3 Skala Richter terjadi di Hanshin dan Awaji. Pada bulan Januari tahun 1995, gempa ini menelan korban sampai 6.437 jiwa dan meruntuhkan gedung Pemerintahan kota Kobe setinggi 6 lantai. Karena gedung tempat yang seharusnya menjadi pusat komando bencana dan para pemimpinya ikut menjadi korban, maka polisi dan petugas kebakaran yang harus segera mengambil tindakan cepat tanggap bencana mengalami keterlambatan tiba di lapangan. Dalam Undang-Undang tentang Pedoman Kebijakan Penanggulangan Bencana telah ditetapkan pada dasarnya penanggulangan bencana dilakukan dari bawah ke atas. Artinya, yang pertama kali harus menanggulangi bencana adalah aparat desa, apabila diluar kemampuan aparat desa maka akan ditanggulangi oleh pemerintah ibu kota dan provinsi. Apabila terjadi bencana besar, maka negara akan bertindak atas permintaan Gubernur, pemerintah ibu kota dan provinsi. Namun, jika kota mengalami kerusakan maka fungsinya sebagai pusat penanggulangan bencana tidak dapat dijalankan.

Berdasarkan pengalaman tersebut, pada bulan Desember 1995 dilakukan revisi Undang-Undang tentang Pedoman Kebijakan Penanggulangan Bencana. Maka, ketika terjadi bencana besar yang luar biasa, walaupun tanpa adanya pengumuman darurat bencana, Perdana Menteri dapat langsung bertindak dengan membentuk Pusat Penanggulangan Bencana Darurat.

Selain itu, didapatkan fakta bahwa 80% korban meninggal akibat tertimpa bangunan atau dalam kurun waktu kurang dari 15 menit setelah kejadian bencana alam terjadi. Dari sini timbul kesadaran akan pentingnya pencegahan dini bencana. Karena sebagian besar korban jiwa meninggal karena tertimpa bangunan, maka muncul upaya untuk membangun bangunan yang tahan gempa. (https://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/whatisoda_04g1.htm diakses pada 23 Maret 2019 pukul 14:31)

Jepang menyadari tidak ada yang bisa diubah dari letak negara yang membuat mereka seringkali dilanda bencana. Namun, negara Jepang percaya jumlah korban dan kerusakan bisa ditekan dengan persiapan yang sangat baik sebelum bencana itu datang. Peranan pemerintah sangat berpengaruh terhadap kesiapan penanggulangan setelah bencana terjadi. Contoh peranan pemerintah yaitu menetapkan standar mendirikan bangunan yang harus tahan gempa, lalu pemerintah Jepang juga bergerak cepat agar rakyat yang menjadi korban tidak terlantar tanpa bantuan dari pemerintah. Selain itu sikap penduduk Jepang juga terlatih untuk tidak banyak mengeluh saat terjadi bencana dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Saling bahu membahu untuk mengurangi penderitaan sesama korban bencana.

Dari penjelasan tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang mekanisme penanggulangan bencana gempa bumi dan peranan pemerintah dari negara Jepang yang memiliki penanganan bencana alam paling baik. Untuk itu

penulis mengangkat judul “Mitigasi Bencana Gempa Bumi pada Masyarakat Jepang”.

B. Rumusan dan Fokus Masalah

a. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan pemerintah Jepang dalam menanggulangi gempa bumi yang terjadi di Jepang?
2. Bagaimana sikap penduduk Jepang saat bencana alam gempa bumi terjadi di Jepang?

b. Fokus Masalah

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini penulis membatasi penelitian pada penanggulangan bencana alam yang terjadi di Jepang sampai tahun 2018.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Jepang dalam menanggulangi bencana alam yang terjadi di Jepang.

- b. Untuk mengetahui bagaimana sikap penduduk Jepang saat terjadi bencana alam di Jepang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

- 1) Untuk menambah pengetahuan tentang mitigasi bencana alam gempa bumi di Jepang.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan manfaat sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya tentang bagaimana mitigasi bencana alam gempa bumi di Jepang sampai dengan tahun 2018.

D. Definisi Operasional

1. Mitigasi adalah tindakan mengurangi dampak bencana (KBBI online ke lima, diakses pada tanggal 27 Maret 2019 pukul 14.35)
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (<https://bnpb.go.id/definisi-bencana> diakses pada 27 Maret 2019 pukul 15.52)

3. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor (<https://bnpb.go.id/definisi-bencana> diakses pada 27 Maret 2019 pukul 15.59)
4. Gempa bumi adalah suatu gerakan bumi yang berwujud suatu sentakan asli yang terjadi di dalam bumi yang kemudian merambat ke permukaan bumi (D. Endarto dan K. Rahman, 2019, 5)

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan definisi operasional serta sistematika penulisan. Bab II Landasan Teoretis, pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori para ahli mengenai definisi-definisi yang berhubungan dengan fakta atau kasus yang sedang dibahas. Bab III Metodologi Penelitian, bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian, teknik pengumpulan data, proses penelitian, serta sumber data. Bab IV Analisis Data, dalam bab ini data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, dikaitkan dengan landasan teori yang dibahas dalam bab II sehingga jelas bagaimana data hasil penelitian dapat menjawab permasalahan. Bab V Kesimpulan dan Saran, bab ini menguraikan mengenai uraian dari seluruh bab yang dijelaskan sebelumnya, berupa kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian.